

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aschauer, D. A. (1990). *Why Is Infrastructure Important?* New York.
- Parkin, J., & Sharma, D. (1999). *Infrastructure Planning*. London: Thomas Telford.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill International Book Co. USA.
- Saleh, D. Z., & et, a. (2014). *Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia*. Jakarta: Ruas.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta, CV.
- Wahidi, R. (2015). *Membangun Perdesaan Modern (Tata Kelola Infrastruktur Desa)*. Jakarta: PT Indec.

Dokumen Instansi

- BPS Kabupaten Lampung Barat, 2015. *Lampung Barat Dalam Angka 2015*. Liwa.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, 2013. *Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan*. Liwa.
- Materi Teknis RTRW Kabupaten Lampung Barat 2010 – 2030*. Liwa.

Jurnal, Paper, Proceeding, Publikasi Terbatas, dan Penelitian

- Bank, World. (1994). *World Development Report: Infrastructure for Development*. New York: Oxford University Press.
- Indonesia, Bank. (2012). *Laporan Final Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan Umkm 2012 Provinsi Lampung*. Bogor: Pt. Primakelola Agribisnis Agroindustri.

- Dailami, M., & dkk. (2011). *Global Development Horizon 2011 - Multipolarity: The New Global Economy*. World Bank.
- Das, S. B., & James, C. (2013). Addressing Infrastructure Financing in Asia. *ISEAS Working Paper*.
- Direktorat Riset dan Pengmas UI. (2007). *KAJIAN ASPEK KEMASYARAKATAN DI DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INDONESIA*. Depok: Universitas Indonesia.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Indonesia, P. R. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Irawati, & Dkk. (2012). Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumberdaya Alam, Serta Variabel Sumber daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. *J@TI Undip*, 43-50.
- Malik. (2011). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Jalan Sebagai Upaya Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Sabua Vlo:3*, 1-6.
- Marsuki. (2007). Strategi Membangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah. *Workshop Inn Red International*, (p. 2). Jakarta.
- Murwito, S., & et.al. (2012). *Infrastructure Quality, Local Government Spending and Corruption*. KPPOD.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 222-236.
- Pisu, M. (2010). Tackling Infrastructure Challenge in Indonesia. *OECD Economics Departement Working Paper, No. 809*.

Saaty, T. L. (2008). Decesion Making With The Analytic Hierarchy Process. *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2008, 83-98.

Undang-undang, Peraturan, dan Dokumen Formal Lainnya

Keputusan Menteri Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Penataan Lingkungan Perumahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Media Online

Surachman, E. N. (2016, April 24). *Files: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: kemenkeu.go.id

Syaifullah. (2010, Februari). *Syaifullah08 Wordpress*. Diambil kembali dari Wordpress: syaifulla08.wordpress.com